

**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2025**

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA**



## KATA PENGANTAR

---

Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan turunan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026. Pada prinsipnya Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan Dokumen Tahunan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang merupakan prioritas bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya di tahun 2025. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini masih jauh dari sempurna, tetapi mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 ini dapat terlaksana sesuai harapan dan tahapan yang telah dilalui serta memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, 19 Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA**



**YUSRAN ANIZAM, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 196906301989031005**

## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>III</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	7
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH</b>	
<b>TAHUN LALU</b> .....	<b>8</b>
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH	
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD .....	8
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD .....	35
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN	
FUNGSI SKPD .....	38
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	41
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
MASYARAKAT .....	55
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN</b>	
<b>SUB KEGIATAN</b> .....	<b>61</b>
3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN	
PROVINSI .....	61
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD .....	61
3.3. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN .....	62
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ....</b>	<b>86</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya .....	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya .....	37
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 .....	43
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kubu Raya .....	55
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya .....	69
Tabel 4.1	Pagu Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 .....	87

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa salah satu ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Renja-PD merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah yang disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan mengacu kepada dokumen perencanaan tahunan daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah Kubu Raya menyusun RKPD transisi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025. RKPD transisi tersebut merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPD. RKPD transisi ini akan menjadi acuan penyusunan Renja PD.

Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya perlu menetapkan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai dasar acuan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya ini pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
  21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  23. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barta Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

- Kalimantan Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 28);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
  39. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
  40. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 10);
  41. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 11);
  42. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 20).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu satu tahun yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan

operasional didalam terwujudnya pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 sebagaimana yang dikehendaki.

Oleh sebab itu Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 mempunyai maksud dan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran teknis dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang bersifat indikatif yaitu dengan memuat indikator keluaran/kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan tugas pokok.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 terdiri dari:

BAB I           PENDAHULUAN

BAB II           HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun lalu dan capaian rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Analisis Kinerja Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan telaahan terhadap usulan masyarakat.

BAB III          TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB IV          RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH

Menjelaskan tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator dan target serta rencana pendanaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB V           PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

.....

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA**

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Pada Tahun Anggaran 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya mendapat alokasi dana hingga APBD Perubahan sebesar **Rp58.695.865.552,00** dengan realisasi anggaran hingga bulan Desember 2023 sebesar **Rp52.642.539.601,00** atau dengan persentase serapan sebesar **89,69%** yang terdiri atas:

1. Belanja Operasi dengan pagu anggaran sebesar **Rp58.695.865.861,00** dengan realisasi sebesar **Rp52.642.539.601,00** dengan persentase serapan sebesar **86,69%** yang terdiri atas:
  - Belanja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar **Rp15.613.039.861,00** dengan realisasi sebesar **Rp14.601.978.190,00** dengan persentase serapan sebesar **93,52%**.
  - Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran sebesar **Rp38.656.886.706,00** dengan realisasi sebesar **Rp34.201.084.441,00** dengan persentase serapan sebesar **88,47%**.
  - Belanja Hibah dengan pagu anggaran sebesar **Rp2.315.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp2.290.000.000,00** dengan persentase serapan sebesar **98,92%**.
2. Belanja Modal dengan pagu anggaran sebesar **Rp2.110.938.985,00** dengan realisasi sebesar **Rp1.549.476.970,00** dengan persentase serapan sebesar **73,40%**

yang terdiri atas:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp2.110.938.985,00** dengan realisasi sebesar **Rp1.549.476.970,00** dengan persentase serapan sebesar **73,40%**.

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Tahun 2023**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2019-2024)	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		
	Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Program Pengelolaan Izin Lokasi</b>	<b>Persentase Izin Lokasi yang Diselesaikan</b>	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	83,33	83,33	
-	Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah / Kabupaten Kota	Persentase Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah/Kabupaten Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	83,33	83,33
-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Dokumen Kepatuhan Perusahaan Terhadap Peraturan Pemerintah	Dokumen	12	1	1	1	100,00	-	3	25,00
<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Diselesaikan</b>	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	83,33	

-	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	83,33
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Penyelesaian Kasus Pertanahan	Kasus	-							
-	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Mediasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Mediasi	24	12	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Berita Acara	28	12	12	12	100,00	12	12	42,86
-	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen	2	1	1	1	100,00	1	1	50,00
<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,33</b>	<b>83,33</b>
-	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	83,33
		Luas Lahan Kebutuhan Pembangunan	m2	-	-	-	-	-	-		

-	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Bidang Tanah Yang Akan Diberikan ke Masyarakat	Persil	300	150	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	2	1	1	1	100,00	1	1	50,00
-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pengadaan Tanah	Bidang Tanah	4	2	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen	2	1	0	0	0,00	1	1	50,00
<b>Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</b>		<b>Persentase Penetapan Redistribusi Tanah</b>	<b>Fasilitasi Subjek</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-
-	<b>Kegiatan Penetapan Subjek dan Onjek Redistribusi Tanah serta ganti kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penetapan Subjek Redistribusi Tanah</b>	<b>Orang</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Sub Kegiatan Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Berita Acara	-	-	-	-	-	-	-	-

-	Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Penetapan Tanah Ulayat</b>		<b>Persentase Penetapan Tanah Ulayat</b>	<b>%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<b>Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Bidang Tanah Ulayat yang diinventarisasi</b>	<b>Bidang</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Pengelolaan Tanah Kosong</b>		<b>Persentase Pengamanan Tanah Kosong Aset Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,33</b>	<b>83,33</b>
-	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	83,33
		Jumlah Bidang Tanah yang Telah Dilakukan Inventarisasi	Bidang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Tanah	320	160	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten yang Diinventarisasi	Laporan	2	1	1	1	100,00	1	1	1	50,00
<b>Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

			<b>Persentase Penyampaian Informasi Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
-		Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	%	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	
-		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	2	-	1	1	100,00	1	1	50,00	
<b>Program Penatagunaan Tanah</b>			<b>Persentase Penatagunaan Tanah yang Diselesaikan</b>	%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
-		Kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00
			Jumlah Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
-		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Jumlah Pengajuan Administrasi Bidang Pertanahan Aset Pemerintah (Sertifikat)	Pengajuan	120	85	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Dokumen	300	1	1	1	100,00	1	1	50,00	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>			<b>Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
			<b>Nilai SAKIP</b>	<b>Poin</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
-		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00

			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
-		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	5	2	2	100,00	2	2	100,00
-		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	-	-	-	-	-	1	100,00
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	1	1	1	100,00	1	1	50,00
-		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	-	-	-	-	-	1	100,00
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	1	1	1	100,00	1	1	50,00
-		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	-	-	-	-	-	1	100,00
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	1	1	1	100,00	1	1	50,00
-		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	-	-	-	-	-	1	100,00
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	1	1	100,00	1	2	50,00

-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	2	-	-	-	-	4	100,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	6	6	6	100,00	6	2	50,00
-	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	28	14	-	-	-	-	28	100,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	210	1429	1400	1382	98,71	1400	1400	50,00
-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	24192	11487	7500	6756	90,08	7500	13512	47,62
-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	1	-	-	-	-	2	100,00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	1	1	1	100,00	1	1	50,00

-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Laporan	34	17	-	-	-	-	34	100,00
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Laporan	34	17	17	17	100,00	17	17	50,00
-	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	1	1	1	100,00	1	1	50,00
-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00
		Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Difasilitasi	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	1	1	1	100,00	1	1	50,00
-	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-

-	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	30	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	24	12	12	12	100,00	12	12	50,00
-	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00
		Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	6	4	4	100,00	4	4	50,00
-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	4	4	4	100,00	4	4	50,00
-	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	12	12	12	100,00	12	12	50,00
-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persediaan Koran dan Majalah	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
-		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka Waktu Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	300	434	434	100,00	300	434	72,33
-		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	1	1	1	100,00	1	1	50,00
-		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	749	176	167	137	82,04	176	528	70,50
-		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	23	1	2	2	100,00	1	6	50,00
-		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Meubeler	Item	10	5	-	-	-	-	10	100,00
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	65	60	27	27	100,00	60	87	72,50
-		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin	Item	12	6	-	-	-	-	12	100,00
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100	54	77	48	62,34	54	102	52,31
-		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Item	28	14	-	-	-	-	28	100,00

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	300	61	61	60	98,36	61	121	66,12
-		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	192	42	48	48	100,00	48	96	66,67
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-
-		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka Waktu Pelayanan Surat Menyurat	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	12	12	12	100,00	12	24	66,67
-		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	10	12	12	100,00	12	24	66,67
-		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	10	12	12	100,00	12	24	66,67
-		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor (Petugas Kebersihan)	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	10	12	12	100,00	12	24	66,67
-		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	438	243	243	243	100,00	243	486	66,67

			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pembiayaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	114	57	57	57	100,00	57	114	66,67
-		Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2	1	1	1	100,00	1	1	50,00
-		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	250	185	185	185	100,00	185	370	66,67
-		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00
			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-

-	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	28	14	-	-	-	-	28	100,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	56	28	28	28	100,00	28	56	66,67
-	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Stel	32	16	-	-	-	-	32	100,00
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	4	2	2	2	100,00	2	4	66,67
-	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	100	96	96	96	100,00	96	197	65,67
-	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00
		Jumlah Paket Pelayanan Fasilitasi Kerumahtanggaan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bulan	24	12	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	8	4	4	4	100,00	4	4	50,00
-	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bulan	24	12	-	-	-	-	-	-

			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	8	4	4	4	100,00	4	4	50,00
	-	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bulan	24	12	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	8	4	4	4	100,00	4	4	50,00
-		Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00
			Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi	OPD	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen e-Formasi Kabupaten Kubu Raya	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00
			Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan UPTD	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00
			Jumlah Dokumen Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00
			Jumlah Dokumen Profil Kelembagaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00
			Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00
			Jumlah Dokumen Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	12	6	6	6	100,00	6	6	50,00

-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Koordinasi Antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat	Kali	4	2	-	-	-	-	4	100,00
		Jumlah OPD yang di Monitoring dan Evaluasi atas Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	OPD	74	37	-	-	-	-	74	100,00
		Jumlah OPD yang di Monitoring dan Evaluasi atas Standar Operasional Prosedur	OPD	74	37	-	-	-	-	74	100,00
		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Teknis di Bidang Ketatalaksanaan	Kali	2	1	-	-	-	-	2	100,00
		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Teknis di Bidang Pelayanan Publik	Kali	2	1	-	-	-	-	2	100,00
		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Kali	2	1	-	-	-	-	2	100,00
		Jumlah OPD yang di Sosialisasi dan Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik	OPD	74	37	-	-	-	-	74	100,00
		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Pelaksanaan Sosialisasi Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas, Jam Kerja, Metode Kerja Prosedur Kerja dan Pola Hubungan Kerja	Dokumen	4	2	-	-	-	-	4	100,00
		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Kubu Raya	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	14	7	7	7	100,00	7	7	50,00

-	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kali	8	4	-	-	-	-	8	100,00
		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2021 Kabupaten Kubu Raya	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	Dokumen	4	2	-	-	-	-	4	100,00
		Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00
		Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	22	4	4	4	100,00	4	4	50,00
-	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	10	-	5	5	100,00	5	5	50,00
-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	2	-	3	3	100,00	3	3	50,00
-	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	8	4	4	4	100,00	4	8	66,67

-	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	8	4	4	4	100,00	4	8	66,67	
-	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Fasilitasi Dokumentasi Tugas Pimpinan	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00	
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	8	4	4	4	100,00	4	8	66,67	
<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>			<b>Persentase Kebijakan dan yang</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
-	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00	
-	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kegiatan APKASI	Kegiatan	2	1	-	-	-	-	2	100,00	
		Jumlah Kegiatan HUT KKR	Kegiatan	2	1	-	-	-	-	2	100,00	
		Fasilitasi Satgas Saber Pungli	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	4	4	2	2	100,00	4	4	50,00	
-	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Daerah dalam Penataan Kewilayahan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	Daerah	2	1	-	-	-	-	2	100,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	4	9	9	9	100,00	9	9	50,00	
-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00	
		Jumlah Dokumen LPPD	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00	
		Jumlah Dokumen SPM	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00	

			Fasilitasi HUT RI	Kegiatan	2	1	-	-	-	-	2	100,00
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	8	4	4	4	100,00	4	4	50,00
-	Kegiatan Kebijakan Rakyat	Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00
-	Sub Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi	Jumlah Jamaah Haji yang Difasilitasi	Jamaah	624	312	-	-	-	-	623	99,84
			Jumlah Rapat, Pelepasan, dan Tasyakuran Kafilah MTQ	Kegiatan	2	2	-	-	-	-	4	100,00
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hafizh dan Hafizhah	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	14	4	4	4	100,00	4	4	50,00
-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Rakor Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan	2	1	-	-	-	-	1	100,00
			Jumlah Rakor Hibah dan Bantuan Sosial	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Kegiatan	2	1	-	-	-	-	2	100,00
			Jumlah Pelaksanaan Zikir Akbar HUT Kubu Raya	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	-	-

			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	6	3	3	3	100,00	3	3	50,00
	-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Daerah yang di Fasilitasi atas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji	Kecamatan	18	9	-	-	-	-	18	100,00
			Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Data Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Desa Pelaksanaan Safari BKMT	Desa	30	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan	Kali	34	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Pelaksanaan Penetapan Naskah Akademik Raperda Masyarakat Miskin	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	10	3	5	5	100,00	3	3	50,00
-		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00

-	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa Yang Dievaluasi	Rancangan Peraturan Desa	700	350	-	-	-	-	700	100,00
		Jumlah Produk-Produk Hukum (Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah) Yang Dikaji	Produk Hukum	1600	800	-	-	-	-	1600	100,00
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Yang Disusun dan Dibahas	Rancangan Peraturan Daerah	6	3	-	-	-	-	6	100,00
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	2316	1158	1063	1063	100,00	1158	2221	69,65
-	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kubu Raya	Rencana Aksi	2	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Penanganan Terhadap Perkara dan Permasalahan Hukum Yang Ada	Masalah	10	5	-	-	-	-	10	100,00
		Jumlah Pembentukan/Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	Kelompok	2	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	6	1	6	6	100,00	1	1	87,50
-	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Dikelola, Ditata, dan Didokumentasikan	Produk Hukum	1600	60	-	-	-	-	120	100,00
		Jumlah Daerah atas Penyebarluasan Produk Hukum Pusat dan/atau Produk Hukum Daerah	Kecamatan	18	9	-	-	-	-	18	100,00
		Penyediaan Informasi dan Dokumentasi Hukum Via Internet	Paket	2	1	-	-	-	-	2	100,00

			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	1616	850	813	813	100,00	850	1663	65,22
-		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00
			Jumlah Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kegiatan	-		-	-	-	-	-	-
-		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	24	12	12	12	100,00	12	24	66,67
-		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Bulan	24	12	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	2	0	0	0	0,00	1	0	0,00
-		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	2	1	1	1	100,00	1	1	50,00
<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>			<b>Persentase Kebijakan dan yang Terlaksana</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
-		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00
-		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Kebijakan Pengelolaan BUMD Kabupaten Kubu Raya	Laporan	2	1	-	-	-	-	2	100,00
			Jumlah Laporan Kebijakan Pengelolaan BLUD Kabupaten Kubu Raya	Laporan	2	1	-	-	-	-	2	100,00

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	1	1	1	100,00	1	1	50,00
	-	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan Kegiatan TPID Kabupaten Kubu Raya	Laporan	2	1	-	-	-	-	2	100,00
			Jumlah laporan Kegiatan TPAKD Kabupaten Kubu Raya	Laporan	2	1	-	-	-	-	2	100,00
			Jumlah laporan Kegiatan pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	1	-	-	-	-	2	100,00
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	6	3	2	2	100,00	2	3	50,00
	-	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan	2	1	-	-	-	-	2	100,00
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	2	1	1	1	100,00	1	2	66,67
-		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00
	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	2	1	1	1	100,00	1	2	66,67
	-	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	2	-	1	1	100,00	1	2	66,67

-	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	1	1	1	100,00	1	2	66,67	
-	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melalui LPSE	Paket	300	269	-	-	-	-	532	88,67	
		Jumlah Daerah Penerima Data dan Dokumen untuk perbaikan serta Tata Tertib Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kecamatan	18	9	-	-	-	-	18	100,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	380	180	110	110	100,00	180	290	53,70	
-	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Layanan Pengguna LPSE Kabupaten Kubu Raya	Laporan	10	5	-	-	-	-	10	100,00	
		Jangka Waktu Pelaksanaan Operasional Pendukung SPSE	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00	
		Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Aplikasi	2	1	-	-	-	-	2	100,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	10	3	3	3	100,00	3	6	66,67	

-	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDA yang Memahami tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan	Orang	8	4	-	-	-	-	8	100,00
		Peningkatan Tingkat Kematangan UKPBJ dan Standarisasi LPSE	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
		Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang akuntabel	Bulan	24	12	-	-	-	-	24	100,00
		Jumlah OPD yang Difasilitasi dalam Penginputan SiRUP Kabupaten Kubu Raya	OPD	74	37	-	-	-	-	74	100,00
		Jumlah SDA yang mengikuti Workshop peningkatan Sumber Daya Aparatur	Orang	300	150	-	-	-	-	300	100,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	500	125	125	125	100,00	125	250	66,67
-	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00
-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Data dan dokumen Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen	4	1	1	1	100,00	1	2	66,67
-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Data dan dokumen Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup	Dokumen	2	1	1	1	100,00	1	2	66,67
	-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Data dan dokumen Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	2	1	-	-	-	-	2	100,00
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	Dokumen	2	1	1	1	100,00	1	2	66,67

Dari tabel 2.1, diketahui bahwa hampir seluruh target kinerja telah hampir tercapai namun tidak dengan capaian realisasi anggaran pada tahun 2023. Adapun beberapa target kinerja yang tidak tercapai dengan maksimal berdasarkan realisasi anggaran tahun 2023 antara lain:

1. Pada sub kegiatan Pengadaan Mebel, hal ini dikarenakan adanya defisit anggaran yang terjadi pada Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya yang berdampak langsung pada pembayaran kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Akibat dari itu, pada sub kegiatan ini tidak terjadi realisasi baik dari segi anggaran maupun kinerja.
2. Dampak dari defisit tersebut juga terjadi pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari target yang ditetapkan, hanya 62,34% yang dapat terlaksana.

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dipahami bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis serta menyelenggarakan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan lingkup tugas, yang dapat dibagi kedalam 3 (tiga) peran utama yaitu:

1. Pelayanan Sebagai Pengambil Kebijakan

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Sekretariat Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana/prasarana pemerintah daerah yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

2. Pelayanan Sebagai Koordinator Pembangunan Daerah

Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

### 3. Pelayanan Administrasi

Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			BB (71,20)	BB (71,30)	BB (78,50)	BB (79,80)	n/a	n/a	BB (78,50)	BB (79,80)	
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			B (85,80)	B (86,20)	B (87,89)	A (90,78)	n/a	n/a	B (87,89)	A (90,78)	

Dari tabel 2.2 diatas, secara rata-rata realisasi capaian kinerja perangkat daerah telah tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan. Untuk realisasi capaian pada tahun 2023 dan tahun 2024 belum dapat diketahui poin capaiannya baik untuk indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) maupun nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk tahun 2023, hingga dokumen ini disusun penilaian atas kedua indikator belum dilaksanakan penilaian. Adapun penilaian untuk indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kubu Raya, dan untuk indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Untuk tahun 2024, penilaian kedua indikator tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2025.

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu strategis yang terjadi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah masalah kurangnya sumber daya aparatur yang berkualitas, terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan serta belum optimalnya penataan kelembagaan dan sistem pemerintahan (*apacity building*).

#### 1. Isu-isu Strategis Lingkungan Internal

Kekuatan (*Strengths*), yaitu faktor-faktor yang ada di Sekretariat Daerah yang berjalan baik atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal/aset utama untuk pencapaian target kinerja. Beberapa kekuatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya antara lain:

- a) Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah telah tertata dengan baik melalui Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, merupakan salah satu faktor kekuatan yang memberikan legalitas dan kepastian hukum bagi pegawai untuk dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mekanisme aturan yang telah ditetapkan.
- b) Komitmen dan dedikasi pimpinan dan pegawai Sekretariat Daerah yang tinggi. Pimpinan dan seluruh pegawai Sekretariat Daerah mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- c) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan pegawai Sekretariat Daerah dan sesama pegawai Sekretariat Daerah. Pimpinan Sekretariat Daerah memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan staf/bawahannya (hubungan vertikal), begitu pula dengan sesama pegawai (hubungan horizontal). Rasa kebersamaan sebagai satu *team work* selalu dibina dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- d) Tersedianya kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah yang cukup memadai. Sebagian besar pegawai Sekretariat Daerah berpendidikan Strata 1 (S1) dan Strata 2

(S2), kondisi ini memudahkan terjadinya transformasi informasi dari berbagai sumber sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan berkualitas.

Kelemahan (*Weaknesses*), yaitu faktor-faktor di Sekretariat Daerah yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan tetapi tidak dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, faktor-faktor tersebut adalah:

- a) Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai yang memiliki kompetensi. Sebagai kabupaten baru yang memiliki pegawai dari berbagai daerah dan satuan kerja, mengharuskan Sekretariat Daerah meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai yang berkompetensi.
- b) Belum tersedianya data yang akurat dalam menunjang peningkatan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.
- c) Belum tersedianya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peningkatan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

## 2. Isu-isu Strategis Lingkungan Internal

- a) Peluang (*Opportunity*), yaitu faktor-faktor lingkungan luar yang positif, antara lain :
  - 1) Kebijakan pemerintah daerah yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan mewujudkan sistem birokrasi administrasi yang bersih dan berwibawa menjadikan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai barometer/percontohan dalam pengelolaan birokrasi di Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu Sekretariat Daerah sebagai salah satu institusi yang bertanggungjawab dalam peningkatan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat berkewajiban dan bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Dukungan kebijakan akan menjadikan peluang untuk bekerja lebih baik lagi demi mendukung kebijakan Daerah tersebut.
  - 2) Letak yang berbatasan langsung dengan ibukota provinsi Kalimantan Barat memberikan peluang Kabupaten Kubu Raya khususnya Sekretariat Daerah

untuk peningkatan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Kawasan strategis dan cepat tumbuh sebagai Kawasan *hinterland* Kota Pontianak yang memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya. Disamping itu juga dengan letak Kabupaten Kubu Raya sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Barat, yang memberikan peluang pengembangan Kabupaten Kubu Raya yang maju dan dikenal di lingkup Kalimantan Barat maupun nasional dan mancanegara.

- 3) Potensi sumber daya alam yang cukup tinggi. Potensi perkebunan, perikanan, pertanian, dan sumber daya alam lainnya memberikan peluang untuk dibuat perencanaan yang tepat bagi peningkatan perekonomian Kabupaten Kubu Raya.
  - 4) Tersedianya pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi sumber daya aparatur. Tawaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di luar dan dalam negeri telah banyak diikuti oleh sumber daya aparatur dalam rangka untuk peningkatan kompetensi.
- b) Ancaman (*Threat*), yaitu faktor-faktor lingkungan luar sebagai ancaman, antara lain sebagai berikut:
- 1) Belum dapat terealisasi semua aspirasi dan keinginan para pemangku kepentingan yang sudah tertampung dalam dokumen perencanaan pembangunan. Keinginan yang lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan, apalagi jika dibandingkan dengan ketersediaan pendanaan, menyebabkan banyak usulan masyarakat yang sudah tertampung dalam peningkatan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat yang belum dapat direalisasikan dalam dokumen penganggaran.
  - 2) Semakin besarnya tuntutan dan keinginan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah. Dengan semakin membaiknya proses transformasi informasi, menyebabkan kontrol dan kritisi terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Jika hal ini tidak

disikapi dengan bijak menyebabkan sulitnya Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan program-program strategis dan inovatif yang justru dibutuhkan masyarakat.

- 3) Geografis dan letak kecamatan yang tersebar, terisolir, dan sulit dijangkau menyebabkan banyaknya sarana dan prasarana di kecamatan yang belum tersedia. Beberapa kecamatan tidak dapat dijangkau dengan jalan darat dari ibukota kabupaten, kondisi ini menyebabkan proses pembangunan menjadi lebih sulit dibandingkan dengan daerah yang dapat dilalui melalui transportasi darat. Penduduk yang tersebar menyebabkan kuantitas sarana dan prasarana yang dibangun menjadi lebih banyak, proses pengalokasian sumber daya yang terbatas menjadi lebih sulit, sehingga menjadi ancaman bagi proses perencanaan yang optimal.
- 4) Proses dan mekanisme peningkatan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat belum dipatuhi oleh segenap *stakeholder*. Proses, mekanisme, dan tata cara perencanaan yang dimulai dari Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional belum sepenuhnya dilaksanakan oleh *stakeholder*. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, tidak sedikit program/kegiatan yang muncul merupakan program/kegiatan yang tidak dibahas dalam Musrenbang Desa, Kecamatan, bahkan Kabupaten. Akibatnya tahapan dan proses perencanaan dianggap sebagai sesuatu rutinitas dan formalitas saja tanpa ada upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih baik dari tahapan-tahapan perencanaan pembangunan daerah tersebut.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 Kabupaten Kubu Raya. Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan

kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
				Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Indikator	Satuan					Indikator	Satuan			
2	1	0	4													
				<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>					<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>							
2	1	0	4	2	0											
				Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten / Kota					Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten / Kota							
2	1	0	4	2	0											
				Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota					Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota							
2	1	0	4	2	0											
				Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota					Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota							
2	1	0	5													
				<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>					<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>							
2	1	0	5	2	0											
				Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota					Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota							
2	1	0	5	2	0											
				Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota					Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota							



2	1	0	8	2	0	0	2	-	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		Jumlah Bidang Tanah yang Telah Dilakukan Inventarisasi	Bidang Tanah	5	219.172.105	-	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		Jumlah Bidang Tanah yang Telah Dilakukan Inventarisasi	Bidang Tanah	5	219.172.105
2	1	0	8	2	0	0	0	1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten yang Diinventarisasi	Laporan	1	219.172.105	-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten yang Diinventarisasi	Laporan	1	219.172.105
2	1	0	9						<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>		<b>Persentase Penyampaian Informasi Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>	%	100	30.276.237		<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>		<b>Persentase Penyampaian Informasi Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>	%	100	30.276.237
2	1	0	9	2	0	0	1	-	Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Kegiatan	2	30.276.237	-	Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Kegiatan	2	30.276.237
2	1	0	9	2	0	0	1	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	1	30.276.237	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	1	30.276.237
2	1	0	0						<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>		<b>Persentase Penatagunaan Tanah yang Diselesaikan</b>	%	100	380.000.000		<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>		<b>Persentase Penatagunaan Tanah yang Diselesaikan</b>	%	100	380.000.000
2	1	0	0	2	0	0	1	-	Kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah Daerah	Dokumen	2	380.000.000	-	Kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah Daerah	Dokumen	2	380.000.000
2	1	0	0	2	0	0	1	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten / Kota	Dokumen	1	380.000.000	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten / Kota	Dokumen	1	380.000.000
4	0	1	0						<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP</b>	Poin	78,50	37.648.918.598		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP</b>	Poin	78,50	37.648.918.598
4	0	1	0	2	0	0	1	-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	193.302.990	-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	193.302.990
4	0	1	0	2	0	0	1	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	57.136.556	-	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	57.136.556
4	0	1	0	2	0	0	1	2	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	33.296.385	-	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	33.296.385

4	0	0	2	0			Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	46.006.094			Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	46.006.094
4	0	0	2	0			Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4.733.056			Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4.733.056
4	0	0	2	0			Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.690.221			Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.690.221
4	0	0	2	0			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	45.440.678			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	45.440.678
4	0	0	2	0			<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>12</b>	<b>16.257.483.115</b>			<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>12</b>	<b>16.257.483.115</b>
4	0	0	2	0			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	105	15.742.654.298			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	105	15.742.654.298
4	0	0	2	0			Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5000	423.315.498			Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5000	423.315.498
4	0	0	2	0			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	38.149.387			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	38.149.387
4	0	0	2	0			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Laporan	17	53.363.932			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Laporan	17	53.363.932

4	0	0	2	-	-	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	117.510.533	-	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	117.510.533
4	0	0	2	0	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	117.510.533	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	117.510.533
4	0	0	2	-	-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Difasilitasi	Orang	105	314.613.932	-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Difasilitasi	Orang	105	314.613.932
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bagian Umum	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	10.000.000	-	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bagian Umum	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	10.000.000
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bagian Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	176.250.000	-	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bagian Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	176.250.000
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bagian Umum	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	53.363.932	-	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bagian Umum	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	53.363.932
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	75.000.000	-	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	75.000.000
4	0	0	2	-	-	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	2.007.035.904	-	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	2.007.035.904
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bagian Umum	Jumlah Paket Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	119.084.500	-	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bagian Umum	Jumlah Paket Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	119.084.500
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bagian Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	1.008.982.396	-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bagian Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	1.008.982.396
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bagian Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	73.890.504	-	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bagian Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	73.890.504
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	434	731.188.000	-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	434	731.188.000
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	73.890.504	-	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	73.890.504

4	0	0	2		-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	231	1.576.325.928	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	231	1.576.325.928
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	750.000.000	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	750.000.000
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	228.132.330	-	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	228.132.330
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Unit	50	544.473.598	-	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Unit	50	544.473.598
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang Disediakan	Unit	150	53.720.000	-	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang Disediakan	Unit	150	53.720.000
4	0	0	2		-	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	48	4.140.990.504	-	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	48	4.140.990.504
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	73.890.504	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	73.890.504
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.120.000.000	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.120.000.000
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.397.100.000	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.397.100.000
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	550.000.000	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	550.000.000
4	0	0	2		-	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	175	3.757.959.639	-	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	175	3.757.959.639
4	0	0	2	0	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	54	1.670.599.300	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	54	1.670.599.300

4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	1.371.721.339	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	1.371.721.339
4	0	0	2	0	-	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	120	715.639.000	-	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	120	715.639.000
4	0	0	2		-	<b>Kegiatan Administrasi dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Administrasi dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>12</b>	<b>1.853.265.156</b>	-	<b>Kegiatan Administrasi dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Administrasi dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>12</b>	<b>1.853.265.156</b>
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	2	275.366.156	-	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	2	275.366.156
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	2	56.735.000	-	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	2	56.735.000
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	8	1.521.164.000	-	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	8	1.521.164.000
4	0	0	2		-	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		<b>Jumlah Paket Pelayanan Fasilitasi Kerumahtanggaan</b>	<b>Paket</b>	<b>36</b>	<b>2.214.000.000</b>	-	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		<b>Jumlah Paket Pelayanan Fasilitasi Kerumahtanggaan</b>	<b>Paket</b>	<b>36</b>	<b>2.214.000.000</b>
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	4	1.096.000.000	-	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	4	1.096.000.000
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	4	784.000.000	-	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	4	784.000.000
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	4	334.000.000	-	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	4	334.000.000
4	0	0	2		-	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>		<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi</b>	<b>OPD</b>	<b>37</b>	<b>516.724.893</b>	-	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>		<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi</b>	<b>OPD</b>	<b>37</b>	<b>516.724.893</b>
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	6	172.250.208	-	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	6	172.250.208

4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	2	119.861.820	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	2	119.861.820
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	142.371.702	-	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	142.371.702
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	2	52.363.758	-	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	2	52.363.758
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	2	29.877.405	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	2	29.877.405
4	0	0	2	0	-	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1200</b>	<b>4.699.706.004</b>	-	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1200</b>	<b>4.699.706.004</b>
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	4	2.219.237.739	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	4	2.219.237.739
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	4	1.739.809.610	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	4	1.739.809.610
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	4	740.658.655	-	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	4	740.658.655
4	0	0				<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT</b>		<b>Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan yang Terlaksana</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>11.568.814.898</b>	-	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT</b>		<b>Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan yang Terlaksana</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>11.568.814.898</b>
4	0	0	2	0	-	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.825.404.282</b>	-	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.825.404.282</b>
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	2	510.392.506	-	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	2	510.392.506
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	3	692.212.812	-	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	3	692.212.812

4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	4	622.798.964	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	4	622.798.964
4	0	0	2	0	-	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	%	<b>100</b>	<b>6.942.228.450</b>	-	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	%	<b>100</b>	<b>6.942.228.450</b>
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	4	1.458.776.500	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	4	1.458.776.500
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	3	246.313.300	-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	3	246.313.300
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	3	5.237.138.650	-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	3	5.237.138.650
4	0	0	2	0	-	<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	%	<b>100</b>	<b>1.038.088.462</b>	-	<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	%	<b>100</b>	<b>1.038.088.462</b>
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	1100	509.402.404	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	1100	509.402.404
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	2	290.400.000	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	2	290.400.000

4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	813	238.286.058	-	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	813	238.286.058
4	0	0	2	0	-	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>		<b>Jumlah Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>25</b>	<b>1.763.093.704</b>	-	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>		<b>Jumlah Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>25</b>	<b>1.763.093.704</b>
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	12	1.628.093.704	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	12	1.628.093.704
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	55.000.000	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	55.000.000
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	80.000.000	-	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	80.000.000
4	0	0	3			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>		<b>Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.932.350.405</b>		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>		<b>Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.932.350.405</b>
4	0	0	2	0	-	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>510.000.000</b>	-	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>510.000.000</b>
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	210.000.000	-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	210.000.000
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	200.000.000	-	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	200.000.000
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	100.000.000	-	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	100.000.000
4	0	0	2	0	-	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>		<b>Persentase pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>276.000.000</b>	-	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>		<b>Persentase pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>276.000.000</b>
4	0	0	2	0	-	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	75.800.000	-	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Laporan	1	75.800.000

4	0	0	2	0	-	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	58.200.000	-	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	58.200.000	
4	0	0	2	0	-	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	142.000.000	-	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	142.000.000	
4	0	0	2	0	-	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>		<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>OPD</b>	<b>37</b>	<b>677.933.978</b>	-	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>		<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>OPD</b>	<b>37</b>	<b>677.933.978</b>	
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	100	198.565.950	-	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	100	198.565.950	
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	3	319.090.559	-	Sub Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	3	319.090.559	
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	150	160.277.469	-	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	125	160.277.469	
4	0	0	2	0	-	<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>468.416.427</b>	-	<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>468.416.427</b>	
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Bagian Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	180.875.605	-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Bagian Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	180.875.605	
4	0	0	2	0	-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Bagian Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	132.045.000	-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Bagian Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	132.045.000	

4	0	0	2	0				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Bagian Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	155.495.822	-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Bagian Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	155.495.822							
<b>Total</b>													<b>52.968.342.141</b>	<b>Total</b>													<b>52.968.342.141</b>

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026, selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Sekretariat Daerah dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2025 Kabupaten Kubu Raya**

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi		Besaran Volume		Catatan Penting
		Alamat	Kecamatan	Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					
1		Surau Al Adzim Rt. 07 Rw. 01 Dusun Meranti Desa Puguk	Sungai Ambawang	5000	Meter Kubik	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
2		Masjid Abdussalam Parit Surabaya Desa Bengakarek	Sungai Ambawang	5000	Meter Persegi	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
3		Masjid Baiturahman Dusun Setia Jaya RT. 04 RW. 02 Desa Ambarawa	Batu Ampar	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025

4		Masjid Nurul Jannah Jl. Adisucipto KM. 10,5 Desa Teluk Kapuas	Sungai Raya	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
5		Masjid Miftahul Huda Desa Sungai Radak Satu	Terentang	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
6		Musholla Hidayah Desa Limbung	Sungai Raya	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
7		Masjid Nur-Hasanah Desa Nipah Panjang	Batu Ampar	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
8		Musholla Nurul Hijrah Desa Sungai Kerawang	Batu Ampar	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
9		Masjid Suhada Desa Batu Ampar	Batu Ampar	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
10		Masjid Nur Hidayah Desa Air Putih	Kubu	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
11		Masjid Nur-Anas Gunung Keruing RT. 21 RW. 09 Dusun Gunung Keruing Desa Batu Ampar	Batu Ampar	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
12		Masjid Al-Ihklas Dusun Suka Maju Desa Nipah Panjang	Batu Ampar	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
13		Gereja Santo Agustinus Sungai Raya	Sungai Raya	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
14		Masjid Nurul Islam Desa Teluk Pakedai Dua	Teluk Pakedai	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
15		Gereja ST Pius Dusun Pancaroba Desa Pancaroba	Sungai Ambawang	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
16		Gereja ST Thomas Corsini Dusun Enggang Jaya Desa Teluk Bakung	Sungai Ambawang	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
17		Gereja ST Taddeus Dusun Gunung Benuah Desa Teluk Bakung	Sungai Ambawang	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
18		Gereja Katolik ST Alfansus Ligouri Dusun Bumi Harapan Desa Jangkang Dua	Kubu	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
19		Masjid Sahil (Sahabat Ilmu) Jl. Parit H. Muksin Desa Sungai Raya Dalam	Sungai Raya	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
20		Musholla Sirotolmostakim TR.2.D Dusun Nipajaya RT.08/03 Desa Sungai Nipah	Batu Ampar	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
21		Masjid Khusnul Khotimah Gg. Madura Desa Padang Tikar 1	Batu Ampar	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
22		Masjid Nurul Muminin Sungai Limau Desa Batu Ampar	Batu Ampar	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
23		Masjid Nurul Iman Dusun Teluk Air Desa Batu Ampar	Batu Ampar	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025

24		Masjid Baiturrahim Desa Padang Tikar 1	Batu Ampar	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
25		Masjid Al-Furqon Desa Radak Baru	Terentang	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
26		Masjid Baiturrohim Desa Radak Baru	Terentang	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
27		Masjid Baiturrahman Dusun Sido Mukti Desa Sungai Radak Satu	Terentang	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
28		Musholla Miftahul Huda Desa Sungai Radak Satu	Terentang	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
29		Masjid Nurut Taqwim Dusun Wonorejo Desa Sungai Radak Satu	Terentang	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
30		Masjid Nasrullah RT.07/03 Kalimas Tengah Desa Kalimas	Sungai Kakap	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
31		Surau Nurul Yaqin Parit Lintang RT.23/002 Desa Tanjung Saleh	Sungai Kakap	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
32		Masjid Nur Ikhlas Desa Arang Limbung	Sungai Raya	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
33		Gereja Bethel Indonesia (GBI) Parit Gudang Desa Sungai Bemban	Kubu	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
34		Gereja Katolik ST Alfansus Ligouri Dusun Bumi Harapan Desa Jangkang Dua	Kubu	1	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
35		Masjid Nurul Iman, Jalan Parit Banjar, RT. 017/RW. 006, Dusun Melati, Desa Kalimas	Sungai Kakap	150	Meter	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
36		Masjid Al Muhajirin Desa Teluk Kapuas	Sungai Raya	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
37		Masjid Al Imam Desa Sungai Raya	Sungai Raya	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
38		Masjid Al Amien Desa Sungai Raya	Sungai Raya	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
39		Masjid Darussalam Desa Parit Baru	Sungai Raya	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
40		Masjid Shirotol Mustaqim, Parit Gelanggang, RT. 04/RW. 05, Desa Sungai Asam	Sungai Raya	50.000.000	Rupiah	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
41		Masjid Fatullah Desa Pasir Putih	Teluk Pakedai	200	Meter Persegi	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
42		Masjid Al Amin Desa Pasir Putih	Teluk Pakedai	200	Meter Persegi	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
43		Masjid Nurul Jannah Desa Simpang Kanan	Sungai Ambawang	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
44		Masjid Assyafi'iyah Desa Simpang Raya	Sungai Ambawang	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025

		(Pemekaran Desa Simpang Kanan)				
45		Masjid Pondok Pesantren Madrasatul Quran Desa Sungai Rengas	Sungai Kakap	200	Meter	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
46		Surau Nurul Mukminin Tanjung Laut Desa Jeruju Besar	Sungai Kakap	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
47		Surau Nurul Iman RT. 017 RW. 004 Dusun Kampung Tengah Desa Tanjung Saleh	Sungai Kakap	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
48		Mushollah Baiturahman Dusun Parit Pangeran Desa Tanjung Saleh	Sungai Kakap	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
49		Masjid Nurul Fattah Dusun 1 RT. 01/RW. 02 Desa Sungai Rengas	Sungai Kakap	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
50		Masjid Nurul Iman Tanggul Laut Sungai Rengas	Sungai Kakap	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
51		Masjid Nurul Islam Dusun Karya Tani RT .002/RW.001 Desa Sungai Belidak	Sungai Kakap	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
52		Masjid Baiturrahim Desa Sungai Kakap	Sungai Kakap	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
53		Masjid Miftahus Salam, Desa Sepakat Baru	Kubu	50.000.000	Rupiah	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
54		Yayasan Darun Nasyiin, Desa Sepakat Baru	Kubu	100.000.000	Rupiah	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
55		Desa Pasak	Sungai Ambawang	100	m3	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
56		MI Al Kautsar Desa Jawa Tengah	Sungai Ambawang	100	m3	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
57		Desa Pasak	Sungai Ambawang	50	m3	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
58		Desa Pasak	Sungai Ambawang	50	m3	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
59		Desa Bengkarek	Sungai Ambawang	100	m3	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
60		Masjid Al Falah Desa Pasak	Sungai Ambawang	100	m3	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
61		Masjid Nurul Yaqin Desa Padang Tikar Satu	Batu Ampar	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
62		Masjid Ainul Yaqin Desa Teluk Nibung	Batu Ampar	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
63		Surau Haqqul yakin Gg. Nasional Desa Mega Timur	Sungai Ambawang	10	Meter Persegi	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
64		Surau Isa Kirin Gg. Nasional Desa Mega Timur	Sungai Ambawang	10	Meter Persegi	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
65		Masjid Baiti Jannati Komplek Srikandi 2	Sungai Raya	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025

		Desa Sungai Raya Dalam				
66		Masjid An Nur Komplek Mawar Indah Desa Sungai Raya Dalam	Sungai Raya	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
67		Masjid Nurhidayatullah Komplek Korpri Desa Sungai Raya Dalam	Sungai Raya	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
68		Gereja Stasi Supadio	Sungai Raya	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
69		Masjid Nurul Ibadah Desa Korek	Sungai Ambawang	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
70		Masjid Nurul Janah Desa Korek	Sungai Ambawang	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
71		Masjid Nurul Hidayah RT. 16 RW. 08 Desa Teluk Nibung	Batu Ampar	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
72		Surau Kulu Dusun Sungai Pandan, Desa Nipah Panjang	Batu Ampar	1	Paket	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
73		Masjid Nurul Iman Jl. Beringin Desa Punggur Besar	Sungai Kakap	50	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
74		Masjid Nurul Iman Jl. Pelita 3 Desa Punggur Kecil	Sungai Kakap	100	Unit	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
75		Masjid Nurul Hidayah Jl. Swadaya Desa Pal 9	Sungai Kakap	50	m2	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
76		Masjid Al-Fatta Komplek Permata Alam Lestari Pal 7 Desa Pal 9	Sungai Kakap	100	m2	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
77		Musholla Equator Park Desa Jeruju Besar	Sungai Kakap	20.000.000	Rupiah	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
78		Masjid Al Hidayah Desa Jeruju Besar	Sungai Kakap	50.000.000	Rupiah	Usulan Pokir DPRD Tahun 2025
79		Rumah Ibadah Jl. Arifin RT. 001 RW. 001 Dusun Medan Deli Desa Medan Mas	Batu Ampar	1	Paket	Usulan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025
80		Rumah Ibadah Jl. Sungai Masjid RT. 007 RW. 001 Dusun Sungai Masjid Desa Medan Mas	Batu Ampar	1	Paket	Usulan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025
81		Rumah Ibadah RT. 004 RW. 001 Dusun Karya Bersama Desa Mengkalang Jambu	Kubu	1	Paket	Usulan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025
82		Rumah Ibadah RT. 001. RW. 001 Dusun Karya Bhakti Desa Mengkalang Jambu	Kubu	1	Paket	Usulan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025
83		Rumah Ibadah RT. 001. RW. 004 Dusun Beringin Desa Puguk	Sungai Ambawang	1	Paket	Usulan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025
84		Rumah Ibadah Parit Senang RT. 003 RW. 006 Dusun Karya Baru Desa Madu Sari	Sungai Raya	1	Paket	Usulan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025

85		Rumah Ibadah RT. 003 RW. 001 Dusun Teluk Raya Desa Pulau Limbung	Sungai Raya	1	Paket	Usulan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025
86		Rumah Ibadah RT. 002 RW. 001 Dusun Parit Baru Desa Seruat Satu	Teluk Pakedai	1	Paket	Usulan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

---

#### **3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

Berbagai arah kebijakan global dan nasional perlu dipertimbangkan dalam menetapkan arah kebijakan yang bersifat lokal dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan dimaksud merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien yang didukung dengan adanya agenda berikut ini:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah yang Berkualitas dan Berwibawa
  - a. Terwujudnya supremasi dan kepastian hukum.
  - b. Meningkatnya tertib administrasi.
  - c. Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan dan pelayanan umum.
2. Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
  - a. Meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat di bidang sosial.
  - b. Meningkatkan perekonomian kerakyatan yang berbasis teknologi dan kemitraan serta meningkatkan mengembangkan iklim investasi yang kondusif, memperluas kesempatan kerja serta pelayanan perizinan yang prima.
3. Mewujudkan Administrasi yang Tertib, Bersih dan Transparan
  - a. Meningkatkan informasi kepada masyarakat secara cepat dan tepat.
  - b. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja secara optimal.
  - c. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi penyelenggaraan birokrasi administrasi guna meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
  - d. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah melalui penerapan birokrasi (kelembagaan).

#### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-

sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan dan sasaran pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan upaya dalam rangka mendukung capaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026:

- a. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

2. Sasaran

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2025-2026, maka Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2025 yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat

### **3.3. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Sekretariat Daerah adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 ditunjang dengan Belanja Operasi yang diperuntukkan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah (Uang). Serta Belanja Modal yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program berdasarkan urusan yang ditangani Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
  - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - (1) Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - (2) Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - (1) Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
  - a. Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - (1) Sub Kegiatan Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
    - (2) Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota
    - (3) Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah
4. Program Penetapan Tanah Ulayat
  - a. Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Tanah Kosong
  - a. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
    - (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
6. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
  - a. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah
    - (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Izin Membuka Tanah
7. Program Penatagunaan Tanah
  - a. Kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
    - (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - (1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - (2) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - (3) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - (4) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
    - (5) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
    - (6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - (4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - (1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - (1) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - (2) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya
  - (3) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - (4) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - (4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - (5) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - (2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - (3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - (4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan

## Perlengkapan Kantor

- (4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - (2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - (3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- i. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- j. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
  - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
  - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
  - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- k. Kegiatan Penataan Organisasi
  - (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
  - (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
  - (3) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
  - (4) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana
  - (5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- l. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
  - (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
  - (3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
9. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
    - (1) Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
    - (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
    - (3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
    - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
    - (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
    - (3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
  - c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
    - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
    - (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
    - (3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
  - d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
    - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
    - (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
    - (3) Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
10. Program Perekonomian dan Pembangunan
- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
    - (1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
    - (2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
    - (3) Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
    - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
    - (2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
    - (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

- c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  - (3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
  - (1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
  - (2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
  - (3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2026**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator	Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
2	104 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Upaya Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan	%		100	438.809.898			100	482.690.888
2	1042 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaksanaan Upaya Penyelesaian Kasus Pertanahan	Kasus		12	438.809.898			13	482.690.888
2	10420 Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Berita Acara	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	12	374.341.014	APBD		13	411.775.116
2	104201 Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	1	64.468.884	APBD		1	70.915.772

2	1	0	5		<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Luas Lahan yang difasilitasi</b>	%		100	500.000.000			100	500.000.000
2	1	0	5	2 0 1	<b>Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas Lahan Kebutuhan Pembangunan</b>	<b>m2</b>		2000	500.000.000			2000	500.000.000
2	1	0	5	2 0 1	0 0 1	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	1	350.000.000	APBD	1	350.000.000
2	1	0	5	2 0 1	0 0 2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	1	150.000.000	APBD	1	150.000.000
2	1	0	6		<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>Persentase Fasilitas Penetapan Subjek Redistribusi Tanah</b>	%		100	200.000.000			100	246.000.000
2	1	0	6	2 0 1	<b>Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah Penetapan Subjek Tanah</b>	<b>Orang</b>		100	200.000.000			100	246.000.000



2	1	0	9			<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>Persentase Penyampaian Informasi Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>	%		100	30.276.237			100	33.303.861
2	1	0	9	2	0	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah</b>	<b>Kegiatan</b>		2	30.276.237			3	33.303.861
2	1	0	9	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	1	30.276.237	APBD		1	33.303.861
2	1	0	1			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase Penatagunaan Tanah yang Diselesaikan</b>	%		100	380.000.000			100	380.000.000
2	1	0	1	2	0	<b>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah Daerah</b>	<b>Dokumen</b>		2	380.000.000			2	380.000.000
2	1	0	1	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten / Kota	Dokumen	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	1	380.000.000	APBD		1	380.000.000
4						<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
4	0	1				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
4	0	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>Poin</b>		78,50	37.648.918.598			79,80	41.453.810.457

4	0	0	2		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>		<b>13</b>	<b>193.302.990</b>			<b>12</b>	<b>212.633.289</b>
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan	3	57.136.556	APBD		2	62.850.212
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	33.296.385	APBD		1	36.626.024
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	46.006.094	APBD		1	50.606.703
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	4.733.056	APBD		1	5.206.362
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	6.690.221	APBD		1	7.359.243
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	45.440.678	APBD		6	49.984.746

4	0	0	2		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>Dokumen</b>			<b>12</b>	<b>16.257.483.115</b>			<b>12</b>	<b>17.883.231.427</b>
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	Bagian Umum		105	15.742.654.298	APBD		115	17.316.919.728
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan		5000	423.315.498	APBD		5000	465.647.048
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Bagian Perencanaan dan Keuangan		1	38.149.387	APBD		1	41.964.326
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	Bagian Perencanaan dan Keuangan		17	53.363.932	APBD		17	58.700.325
4	0	0	2		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>			<b>1</b>	<b>117.510.533</b>			<b>1</b>	<b>129.261.586</b>
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Bagian Umum		1	117.510.533	APBD		1	129.261.586
4	0	0	2		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Difasilitasi</b>	<b>Orang</b>			<b>105</b>	<b>314.613.932</b>			<b>115</b>	<b>346.075.325</b>

4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	Bagian Umum	2	10.000.000	APBD		2	11.000.000
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Bagian Umum	1	176.250.000	APBD		1	193.875.000
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Bagian Umum	2	53.363.932	APBD		2	58.700.325
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Bagian Umum	15	75.000.000	APBD		17	82.500.000
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Bulan</b>		<b>12</b>	<b>2.007.035.904</b>			<b>12</b>	<b>2.207.739.494</b>
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Bagian Umum	4	119.084.500	APBD		4	130.992.950
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Bagian Umum	4	1.008.982.396	APBD		4	1.109.880.636
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Bagian Umum	12	73.890.504	APBD		12	81.279.554

4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Bagian Umum	434	731.188.000	APBD		434	804.306.800
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	73.890.504	APBD		1	81.279.554
4	0	0	2	0	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Unit</b>		<b>231</b>	<b>1.576.325.928</b>			<b>231</b>	<b>1.733.958.521</b>
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Bagian Umum	1	750.000.000	APBD		1	825.000.000
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Bagian Umum	30	228.132.330	APBD		30	250.945.563
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Bagian Umum	50	544.473.598	APBD		50	598.920.958
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Bagian Umum	150	53.720.000	APBD		150	59.092.000
4	0	0	2	0	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>		<b>48</b>	<b>4.140.990.504</b>			<b>48</b>	<b>4.555.089.554</b>

4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Bagian Umum	12	73.890.504	APBD		12	81.279.554
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Bagian Umum	12	1.120.000.000	APBD		12	1.232.000.000
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Bagian Umum	12	2.397.100.000	APBD		12	2.636.810.000
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Bagian Umum	12	550.000.000	APBD		12	605.000.000
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>Unit</b>		<b>175</b>	<b>3.757.959.639</b>			<b>175</b>	<b>4.133.755.603</b>
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Bagian Umum	54	1.670.599.300	APBD		54	1.837.659.230
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Bagian Umum	1	1.371.721.339	APBD		1	1.508.893.473
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Bagian Umum	120	715.639.000	APBD		120	787.202.900

4	0	0	2		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Dokumen</b>		<b>12</b>	<b>1.853.265.156</b>			<b>12</b>	<b>2.038.591.672</b>
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	Bagian Umum	2	275.366.156	APBD		2	302.902.772
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	Bagian Umum	2	56.735.000	APBD		2	62.408.500
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	Bagian Umum	8	1.521.164.000	APBD		8	1.673.280.400
4	0	0	2		<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Pelayanan Fasilitas Kerumahtanggaan</b>	<b>Paket</b>		<b>36</b>	<b>2.214.000.000</b>			<b>36</b>	<b>2.435.400.000</b>
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	Bagian Umum	4	1.096.000.000	APBD		4	1.205.600.000
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	Bagian Umum	4	784.000.000	APBD		4	862.400.000
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	Bagian Umum	4	334.000.000	APBD		4	367.400.000

4	0	0	2		<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi</b>	<b>OPD</b>		<b>37</b>	<b>516.724.893</b>			<b>37</b>	<b>568.397.382</b>
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	Bagian Organisasi	6	172.250.208	APBD		6	189.475.228
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	Bagian Organisasi	2	119.861.820	APBD		1	131.848.002
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	Bagian Organisasi	1	142.371.702	APBD		1	156.608.872
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	Bagian Organisasi	2	52.363.758	APBD		1	57.600.134
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	Bagian Organisasi	2	29.877.405	APBD		2	32.865.146
4	0	0	2		<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>1200</b>	<b>4.699.706.004</b>			<b>1500</b>	<b>5.209.676.604</b>
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4	2.219.237.739	APBD		4	2.441.161.513

4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4	1.739.809.610	APBD		4	1.953.790.571
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4	740.658.655	APBD		4	814.724.520
4	0	0			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT</b>	<b>Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan yang Terlaksana</b>	%		<b>100</b>	<b>11.568.814.898</b>			<b>100</b>	<b>12.624.586.689</b>
4	0	0	2	0	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	%		<b>100</b>	<b>1.825.404.282</b>			<b>100</b>	<b>2.007.944.710</b>
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	Bagian Tata Pemerintahan	2	510.392.506	APBD		2	561.431.757
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	Bagian Tata Pemerintahan	3	692.212.812	APBD		3	761.434.093
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	Bagian Tata Pemerintahan	4	622.798.964	APBD		4	685.078.860
4	0	0	2	0	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	%		<b>100</b>	<b>6.942.228.450</b>			<b>100</b>	<b>7.636.451.295</b>

4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	Bagian Kesejahteraan Rakyat	4	1.458.776.500	APBD	4	1.604.654.150
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3	246.313.300	APBD	3	270.944.630
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3	5.237.138.650	APBD	3	5.760.852.515
4	0	0	2	0	<b>Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum</b>	%		<b>100</b>	<b>1.038.088.462</b>		<b>100</b>	<b>1.038.088.462</b>
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	Bagian Hukum	1100	509.402.404	APBD	1100	509.402.404

4	1	2	2	0	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Kasus	Bagian Hukum	2	290.400.000	APBD		2	290.400.000
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	Bagian Hukum	813	238.286.058	APBD		813	238.286.058
4	0	0	2	0	<b>Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah</b>	<b>Jumlah Fasilitas Kerjasama Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>25</b>	<b>1.763.093.704</b>			<b>30</b>	<b>1.942.102.222</b>
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	12	1.628.093.704	APBD		12	1.776.102.222
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	1	55.000.000	APBD		1	66.000.000
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	1	80.000.000	APBD		1	100.000.000
4	0	0			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>1.932.350.405</b>			<b>100</b>	<b>2.125.585.445</b>
4	0	0	2	0	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>510.000.000</b>			<b>100</b>	<b>561.000.000</b>

4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD, dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi, Monev Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	1	210.000.000	APBD		1	231.000.000
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	2	200.000.000	APBD		2	220.000.000
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	1	100.000.000	APBD		1	110.000.000
4	0	0	2	0	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan</b>	%		<b>100</b>	<b>276.000.000</b>			<b>100</b>	<b>303.600.000</b>
4	0	0	2	0	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	1	75.800.000	APBD		1	83.380.000
4	0	0	2	0	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	1	58.200.000	APBD		1	64.020.000
4	0	0	2	0	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	1	142.000.000	APBD		1	156.200.000
4	0	0	2	0	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>OPD</b>		<b>37</b>	<b>677.933.978</b>			<b>37</b>	<b>745.727.375</b>

4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100	198.565.950	APBD	120	218.422.545
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3	319.090.559	APBD	3	350.999.614
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	150	160.277.469	APBD	150	176.305.216
4	0	0	2	0	<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	%		<b>100</b>	<b>468.416.427</b>		<b>100</b>	<b>515.258.070</b>
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	Bagian Sumber Daya Alam	1	180.875.605	APBD	1	198.963.166
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	Bagian Sumber Daya Alam	1	132.045.000	APBD	1	145.249.500

4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	Bagian Sumber Daya Alam	1	155.495.822	APBD	1	171.045.404
										<b>52.968.342.141</b>			<b>58.137.066.654</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

---

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

1. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan.
2. Keserasian dan keterpaduan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026.
3. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 merupakan program/kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
2. Jumlah urusan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 (dua) urusan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 10 (sepuluh) program di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 sebanyak 80 (delapan puluh) sub kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 secara total sebesar Rp52.968.342.141,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kubu Raya.

**Tabel 4.1**  
**Pagu Indikatif**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**  
**Tahun 2025**

<b>Kode</b>					<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)</b>
(1)					(2)	(7)
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>2</b>	<b>10</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>438.809.898</b>
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>438.809.898</b>
2	10	04	2.01	0004	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	374.341.014
2	10	04	2.01	0005	Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	64.468.884
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>500.000.000</b>
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>500.000.000</b>
2	10	05	2.01	0001	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000

2	10	05	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
2	10	06			<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>200.000.000</b>
2	10	06	2.01		<b>Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>200.000.000</b>
2	10	06	2.01	0005	Sub Kegiatan Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	55.000.000
2	10	06	2.01	0007	Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	35.000.000
2	10	06	2.01	0008	Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	110.000.000
2	10	07			<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>	<b>50.000.000</b>
2	10	07	2.01		<b>Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>
2	10	07	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
2	10	08			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>219.172.105</b>

2	10	08	2.02		<b>Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	<b>219.172.105</b>
2	10	08	2.02	0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	219.172.105
2	10	09			<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>30.276.237</b>
2	10	09	2.01		<b>Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>	<b>30.276.237</b>
2	10	09	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	30.276.237
2	10	10			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>380.000.000</b>
2	10	10	2.01		<b>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>380.000.000</b>
2	10	10	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	380.000.000
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
4	01				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
4	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>37.648.918.598</b>
4	01	01	2.01		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>193.302.990</b>
4	01	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.136.556
4	01	01	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	33.296.385

4	01	01	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	46.006.094
4	01	01	2.01	0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.733.056
4	01	01	2.01	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.690.221
4	01	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.440.678
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.257.483.115</b>
4	01	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.742.654.298
4	01	01	2.02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	423.315.498
4	01	01	2.02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	38.149.387
4	01	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	53.363.932
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>117.510.533</b>
4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	117.510.533
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>314.613.932</b>
4	01	01	2.05	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000

4	01	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	176.250.000
4	01	01	2.05	0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	53.363.932
4	01	01	2.05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	75.000.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.007.035.904</b>
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	119.084.500
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.008.982.396
4	01	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Penggandaan	73.890.504
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	731.188.000
4	01	01	2.06	0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	73.890.504
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.576.325.928</b>
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.000.000
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	228.132.330
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	544.473.598
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.720.000

<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.140.990.504</b>
4	01	01	2.08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73.890.504
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.120.000.000
4	01	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.397.100.000
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.000.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.757.959.639</b>
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.670.599.300
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.371.721.339
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	715.639.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.11</b>		<b>Kegiatan Administrasi dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1.853.265.156</b>
4	01	01	2.11	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	275.366.156
4	01	01	2.11	0002	Sub Kegiatan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	56.735.000
4	01	01	2.11	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.521.164.000

<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.12</b>		<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	<b>2.214.000.000</b>
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.096.000.000
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	784.000.000
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	334.000.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.13</b>		<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>516.724.893</b>
4	01	01	2.13	0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	172.250.208
4	01	01	2.13	0002	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	119.861.820
4	01	01	2.13	0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	142.371.702
4	01	01	2.13	0004	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	52.363.758
4	01	01	2.13	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	29.877.405
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.14</b>		<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>4.699.706.004</b>
4	01	01	2.14	0001	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	2.219.237.739
4	01	01	2.14	0002	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1.739.809.610
4	01	01	2.14	0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	740.658.655
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT</b>	<b>11.568.814.898</b>

<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>1.825.404.282</b>
4	01	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	510.392.506
4	01	02	2.01	0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	692.212.812
4	01	02	2.01	0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	622.798.964
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>6.942.228.450</b>
4	01	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.458.776.500
4	01	02	2.02	0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	246.313.300
4	01	02	2.02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	5.237.138.650
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>1.038.088.462</b>
4	01	02	2.03	0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	509.402.404
4	1	2	2.03	0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	290.400.000
4	01	02	2.03	0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	238.286.058

<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah</b>	<b>1.763.093.704</b>
4	01	02	2.04	0001	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1.628.093.704
4	01	02	2.04	0002	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	55.000.000
4	01	02	2.04	0003	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	80.000.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.932.350.405</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>510.000.000</b>
4	01	03	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD, dan BLUD	210.000.000
4	01	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	200.000.000
4	01	01	2.01	0003	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100.000.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>276.000.000</b>
4	01	03	2.02	0001	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	75.800.000
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	58.200.000
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan dan Pelaksanaan Evaluasi Pelaporan Pembangunan	142.000.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>677.933.978</b>
4	01	03	2.03	0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	198.565.950

4	01	03	2.03	0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Elektronik	Kegiatan Layanan Secara	319.090.559
4	01	03	2.03	0003	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa	Kegiatan dan Pengadaan	160.277.469
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.04</b>		<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Sumber</b>	<b>468.416.427</b>
4	01	03	2.04	0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kegiatan	180.875.605
4	01	03	2.04	0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kegiatan	132.045.000
4	01	03	2.04	0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kegiatan	155.495.822
							<b>52.968.342.141</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

Salah satu dokumen penting yang menjadi acuan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai sebuah unit kerja untuk melaksanakan strategi dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya adalah Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2025 adalah penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang disusun sesuai pedoman yang terdapat didalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya periode 2025-2026. Sebagai sebuah dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2025 menjadi bagian yang penting dalam proses perencanaan pembangunan di Pemerintahan Daerah dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Kubu Raya.

Dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2025 tertuang Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dengan adanya Program dan Kegiatan pada Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 sebagai pedoman teknis perencanaan, secara operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya akan memiliki acuan yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan perencanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025. Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 2025 ini merupakan usulan kegiatan pembangunan baik Fisik maupun Non Fisik yang terpadu di bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik Prasarana serta data dan informasi yang komprehensif dalam menunjang penelitian pengembangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang disertai dengan pagu indikatif biaya yang dibutuhkan. Dengan adanya dukungan dana yang memadai diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan tujuan yang ditetapkan dalam sasarannya.